



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **16** TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2024;
 - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi keuangan Daerah;
 - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI yang memuat penutup.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- (2) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko

pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



ABDUL NAZARUDIN MALOHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 disusun sebagai respon atas dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi terbaru, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan serta pagu indikatif anggaran yang diperlukan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam perjalanannya, perubahan RKPD menjadi penting dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan serta permasalahan yang ada.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, serta menyesuaikan alokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan dari Perubahan RKPD Tahun 2024 ini adalah:

1. Menyesuaikan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan perkembangan kondisi daerah.
2. Mengoptimalkan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Memastikan alokasi sumber daya yang ada dapat digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, meliputi :

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024 dari masing-masing kegiatan;
2. Terjadinya Perubahan Asumsi Makro Ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2024 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Keharusan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai berdasarkan kondisi fiskal yang ada dan merupakan dampak dari perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah.

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 89);
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4).

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN

Perubahan RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Berisi Mengenai Latar Belakang, Tujuan, Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2024, Dasar Hukum Penyusunan Pekerjaan, dan Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD.

2. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bab ini Menyampaikan Tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini Berisi Tentang Perubahan Asumsi Makro Ekonomi, Arah kebijakan Nasional, dan Proyeksi Perubahan kerangka keuangan Daerah Tahun 2024.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini Berisi Mengenai Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini Berisi Mengenai Rencana Program dan Prioritas Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 termasuk didalamnya adalah Kegiatan dan Tolak ukur kinerja serta Pagu Anggaran Tahun 2024.

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini Berisi Mengenai kesimpulan dari Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Jumlah program yang dilaksanakan pada RKPD tahun 2024 sebanyak 139 program dan 821 kegiatan serta 2.094 sub kegiatan. Semua program yang tercantum dalam RKPD tahun 2024 terdapat dalam RPJMD, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya keselarasan antara program RKPD dengan program RPJMD. Dalam isian formulir evaluasi RKPD tahun 2024 tidak ditemui adanya program dan kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam RKPD tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan APBD selaras dengan program dan kegiatan RKPD tahun 2024.

Berikut ini akan disajikan perkembangan kinerja masing-masing urusan pemerintahan daerah:

1. Pendidikan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru mencapai sebesar 68,97 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Pengelolaan Pendidikan, direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik, dan pengadaan barang dan jasa sampai dengan Triwulan II rata-rata masih dalam tahap pelaksanaan. Perkembangan kinerja pembangunan urusan pendidikan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PENDIDIKAN			Rata-rata Kinerja:		68,97
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	100,00	56,35	56,35
		Persentase SD/ MI terakreditasi A	12,9	12,9	100,00
		Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	30,00	30,00	100,00
		Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	73,03	0,00	0,00

No. (1)	Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
		Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	100,00	100,00	100,00
1.1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini yang Dikelola	100,00	100,00	100,00
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang Dikelola	100,00	100,00	100,00
1.3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Mutu Pendidikan SMP	100,00	100,00	100,00
1.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dikelola	100,00	100,00	100,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan	100,00	66,67	66,67
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya yang Ditetapkan	3,00	2,00	66,67

Sumber : Dikbud Bolmut, 2024

2. Kesehatan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan kesehatan baru mencapai sebesar 75,25 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat. Sebagian besar kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV, baik yang terdapat di Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas disemua kecamatan, maupun Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik, dan pengadaan barang dan jasa sampai dengan Triwulan II rata-rata masih dalam proses pengerjaan. Perkembangan kinerja pembangunan urusan kesehatan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
URUSAN KESEHATAN			Rata-rata Kinerja:		75,25
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan RSUD Terakreditasi	95,00	50,00	53,00
		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar	100,00	45,00	45,00
		Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan PBI/JKN	97,25	79,00	81,00
		4. Presentase Pemenuhan Indikator SPM Penyakit Menular,Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar, Orang Resiko terinfeksi HIV, Penderita Hipertensi, Diabetes dan ODGJ Sesuai Standar)	100,00	50,00	50,00
		Persentase Kelompok sasaran Masyarakat (Bayi, Balita,Anak Sekolah, Anak Remaja, Ibu Hamil dan Ibu Nifas) Mendapat Intervensi Gizi	95,00	50,00	53,00
		Standar Pelayanan Minimal Untuk Kelompok Sasaran Ibu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia	96,00	44,00	46,00
		Persentase Desa/Kel yg melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM	75,00	88,89	119,00
		Persentase Operasional Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan	100,00	50,00	50,00
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Rasio Puskesmas, Rasio Pembantu Puskesmas (Pustu dan Poskesdes),	0,83	0,80	96,00

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk			
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian SPM Pelayanan Ibu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia > 85%	90,00	44,00	49,00
		Persentase Operasional Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	100,00	50,00	50,00
		Persentase Keluarga memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih dan Jamban Sehat	75,00	67,90	91,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin	90,00	67,90	91,00
		Persentase Balita, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Remaja Putri Mendptkan PMT, Tablet Fe dan Vit. A	100,00	87,10	87,10
		Persentase Angka Penemuan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular	86,00	82,70	96,00
		Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi Madya	91,67	74,9	82,00
1.3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kelas RS	3,00	1,33	44,00
1.4	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Yang Menyusun Profil Kesehatan	100,00	56,00	56,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	96,00	64,77	67,00
		Persentase Rumah Sakit Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100,00	46,88	47,00
2.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP	Rasio Tenaga Dokter dan Paramedis	0,95	1,03	108,00

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan UKM di Wilayah Kab/Kota				
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yang memiliki Izin Usaha sesuai standar	55,00	44,47	81,00
3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yang mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Usaha	35,00	131,58	376,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kel Yg Melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100,00	100,00	100,00
4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Desa Siaga Aktif	6,00	48,61	807,00
4.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	85,00	81,52	96,00
4.3	Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota	Rasio Posyandu Aktif Per Satuan Balita	20,02	19,00	95,00
Sumber : Dinkes Bolmut, 2024					

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah mencapai 40,22 persen sampai dengan triwulan II. Secara umum, laporan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum ada. Namun semua kegiatan dimaksud sedang dalam tahap pengerjaan sehingga realisasi kinerja belum dapat tergambar pada triwulan II tahun 2024. Perkembangan

kinerja pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d
Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rata-rata Kinerja:		40,22
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pemenuhan Air Baku	55,72	10,00	17,95
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase penanganan sungai di Daerah rawan terdampak abrasi dan luapan	38,35	5,00	13,04
1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase layanan Daerah Irigasi	73,09	20,00	27,36
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	63,40	61,00	96,22
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kab/Kota	Akumulasi Jumlah Sambungan Rumah Air Minum yang Tersedia	12.185,00	1.235,00	10,14
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sarana prasarana persampahan dalam kawasan pengelolaan persampahan	30,00	0,00	0,00
3.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sarana prasaran persampahan	510,00	0,00	0,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase jumlah rumah	11,17	7,00	62,68

	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	tangga yang memiliki akses terhadap air limbah aman			
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Akumulasi Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Aman Tersedia	2.385,00	2.360,00	98,95
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	63,99	0,00	0,00
5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Persentase kondisi baik jaringan drainase dalam sistem jaringan drainase	56.800,00	0,00	0,00
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	43,35	20,00	44,10
6.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Akumulasi jumlah bangunan gedung di wilayah kabupaten yang tertib administrasi	370,00	250,00	67,57
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	71,43	30,00	42,00 -
7.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/Kota	Akumulasi bangunan dan lingkungan dikawasan yang dibangun dan terpelihara	5,00	1,00	20,00
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	81,00	66,00	81,48
8.1	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	Persentase Kondisi Baik Jalan dan Jembatan Kabupaten	71,20	69,00	96,91
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Kondisi Baik	70,00	10,00	14,29
9.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Akumulasi jumlah tenaga terampil konstruksi di Daerah yang	50,00	25,00	50,00

		memiliki sertifikat kompetensi			
9.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyediaan data dan informasi jasa konstruksi di daerah	75,00	0,00	0,00
9.3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	persentase pengawasan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap pekerjaan konstruksi di daerah	100,00	10,00	10,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	69,00	30,00	43,48
10.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan	50,00	0,00	0,00
10.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota"	persentase rencana tata ruang tersusun	75,00	0,00	0,00
10.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	persentase penyediaan data dan informasi tata ruang	100,00	0,00	0,00
10.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Persentase pelaksanaan rekomendasi kesesuaian ruang	82,00	20,00	24,39
Sumber : PUPR Bolmut, 2024					

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru mencapai sebesar 30,00 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Kawasan Permukiman. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III sehingga belum terdapat realisasi pada program tersebut. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
s.d Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024					
No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rata-rata Kinerja:		30,00
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	50,00	25,00	25,00
1.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Jumlah rumah korban bencana/relokasi program Kab serta PSU yang tertangani	70,00	0,00	0,00
1.2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah lembaga pengelolah rusus/rusun yang terfasilitasi	66,67	14,64	21,96
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh tertangani	2,88	0,00	0,00
2.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	25,00	0,00	0,00
2.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni di permukiman kumuh yang tertangani	8,33	0,00	0,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	10,00	1,00	10,00
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kawasan perumahan dan Pemukiman yang terlayani dengan PSU yang Layak	4,00	1,00	25,00
Sumber : Perkimtan Bolmut, 2024					

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat baru mencapai sebesar 29,31 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Masih rendahnya capaian kinerja ini

dikarenakan rata-rata pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rata-rata Kinerja:		29,31
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana	100,00	45,39	45,39
1.1	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten	Presentase Wilayah yang rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana	100,00	0,00	0,00
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Wilayah Yang Siaga Bencana	100,00	54,51	54,51
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Presentase Korban bencana yang dievakuasi	100,00	-	-
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	100,00	67,00	67,00
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	67,00	67,00
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan Perda Sesuai SOP	100,00	0,00	0,00
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00	33,00	33,00
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi melalui Pendataan ferivikasi vaktual warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	3,00	1,00	33,00

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran.	3,00	0,00	0,00
3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0,12	0,00	0,00
Sumber : 1. BPBD Bolmut, 2024 2. Satpol-PP, 2024					

6. Sosial

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial baru mencapai sebesar 50,00 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada *Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*. Program tersebut sedang dalam proses dan sebagian kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Sosial sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Sosial s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN SOSIAL			Rata-rata Kinerja: 50%		
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100%	83%	83%
1.1	Pengumpulan Sumbangan dlam Daerah Kab/Kota	Persentase Penerbitan Perizinan Pengumpulan Sumbangan yang di terbitkan	100%	50%	50%
1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesos Daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang diberdayaaktifkan	100%	33%	33%
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dan urusan wajib bidang sosial	100%	-	-
2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	3,00	-	-

No. (1)	Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lanjut Usia terlantar serta gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang terlayani			
2.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Tuna Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-	-
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Graduasi Mandiri Individu KPM PKH	0,54%		
3.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Graduasi Mandiri Individu KPM PKH	20 KPM		
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan bencana	100%	-	-
4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100%	-	-
4.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap siagaan Bencana Kab/Kota	Persentase kesiapsiagaan bencana	100%	-	-
Sumber : DinsosBolmut, 2024					

7. Tenaga Kerja

Kinerja program pembangunan urusan Tenaga Kerja belum tergambar pada RKPD induk tahun 2024, hal ini diakibatkan oleh alokasi anggaran yang direncanakan bersumber dari APBN belum dapat terealisasi pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA. 2024 sehingga program/kegiatan urusan Tenaga Kerja belum dapat dilaksanakan pada APBD induk TA. 2024. Untuk itu, pada urusan Tenaga Kerja akan dianggarkan kegiatan pelatihan dan magang bagi pencari kerja dalam Perubahan APBD TA. 2024.

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja s.d Triwulan II Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN TENAGA KERJA			Rata-rata Kinerja: 00,00		
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penyerapan tenaga kerja	0,00	0,00	0,00
1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rasio kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja	0,00	0,00	0,00
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	100,00	0,00	0,00
2.1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Kompetensi	40,00	0,00	0,00
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	61,00	0,00	0,00
3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yanga Hanaya Beroperasi Dala 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki data dan Informasi sarana HI	22,00	0,00	0,00
3.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Didaerah Kab/Kota	Persentase Perkara Perselisihan Yang terselesaikan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Disnkaertrans Bolmut, 2024

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencapai sebesar 31,99 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Sebagian besar kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV berdasarkan anggaran kas yang ada. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				Rata-rata Kinerja:	31,99
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan Gende	50%	15%	30%
1.1	Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kab/Kota	Persentase OPD yang melaksanakana n PPRG	50%	5%	5%
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan KabKota	Persentase Pemberdaya an perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyaraka tan	30%	10%	33,33%
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan kualitas Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	40%	16,39%	0,16%
2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Daerah Kab/Kota	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan	6 OPD	20%	20%
2.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah dalam Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan layanan KG dan hak anak didaerah	50%	15%	15%
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	80%	10%	12,5%
3.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	Cakupan Lembaga PHA	30%	0	0
Sumber : DPPKBPPPA Bolmut, 2024					

9. Pangan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pangan telah mencapai sebesar 94,19 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Pengawasan Keamanan Pangan. Sebagian besar kegiatan direncanakan akan dilakukan perubahan/pergeseran anggaran sehingga besar kemungkinan kinerja urusan ini akan terlihat pada akhir tahun 2023. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pangan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Pangan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PANGAN			Rata-rata Kinerja:		94,19
1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Indeks Keterjangkauan	90,00	88,60	98,44
1.1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Tertanganinya Daerah Rawan Pangan	6,00	6,00	100,00
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Yang Aman dikonsumsi	100,00	85,00	85,00
2.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Uji Keamanan Pangan	30,00	19,00	63,33
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Pemanfaatan	70,85	70,22	99,11
3.1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Presentase Tercapainya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	100,00	95,00	95,00
3.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Cadangan Pangan	10,00	-	-
3.3	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Kelompok Tani yang terfasilitasi	50,00	48,00	96,00
Sumber : Dishanpang Bolmut, 2024					

10. Pertanahan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pertanahan baru mencapai sebesar 60,00 persen. Adapun kegiatan unggulan untuk urusan Pertanahan adalah pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah pusat yang menysasar 2.300 bidang tanah yang ada di Bolaang Mongondow Utara. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pertanahan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERTANAHAN			Rata-rata Kinerja:		40,00
1	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	5,00	2,00	40,00
1.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah bersertifikat	40,94	16,90	41,28
Sumber : Perkintan Bolmut, 2023					

11. Lingkungan Hidup

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Lingkungan Hidup baru mencapai 43,00 persen. Beberapa hal mendasar yang saat ini menjadi kendala dalam realisasi kegiatan yang ada di Dinas lingkungan hidup, diantaranya Terdapat beberapa program yang masih belum terealisasi dikarenakan anggaran yang belum mencukupi. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya nanti akan dilakukan pada triwulan III dan IV atau baru akan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2024. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Lingkungan Hidup sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup s.d Triwulan II Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			Rata-rata Kinerja:		43,00
1	PROGRAM PERENCANAAN LH	Persentase Pemenuhan kajian lingkungan hidup	100,00	0,25	0,25
1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	persentase RPPLH Kab. Bolmong utara	1,00	0	0
1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraa n KLHS Kab/Kota	100,00	0,25	0,25
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Pelayanan Perijinan Lingkungan Hidup	50,00	0	0
2.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, air, udara dan laut	Persentase pemantauan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakana lingkungan hidup	100,00	0	0
2.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	72,00	0	0
2.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	27,00	0	0
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran	23,00	7,00	0,29

No (1)	Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	hasil pengawasan			
3.1	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemda Kab/Kota.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemda Kab/Kota	37,00	7,00	18,00
4	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang terkait dugaan kasus lingkungan	13,00	5,00	0,38
4.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100,00	100,00	100,00
5.	PROGRAM PENGENDALIAN B3 DAN LIMBAH B3	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan penghasil B3 dan LB3	30,00	0	0
5.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan LB3	67,00	0	0
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan yang diraih di tk. prov atau nasional	50,00	25,00	25
6.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sekolah peduli lingkungan	33,33	25,00	25
7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan	53,00	71,00	134,00
7.1	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	47,00	92,00	40,00
7.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta	Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah	30,00	0,50	50,00

Sumber : DLH Bolmut, 2024

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru mencapai sebesar 47,18 persen. Hampir seluruh program yang ada di Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV dengan keterbatasan anggaran kas yang ada. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan II Tahun 2024

No. Program dan Kegiatan		Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Rata-rata Kinerja:		47,18
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	75%	0	0
1.1	Penataan Pendaftaran Penduduk	persentase penataan dokumen administrasi kependudukan	80%	0	0
1.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Adminduk	75%	0	0
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan pelayanan pencatatan sipil	75%	25%	33%
2.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase pelayanan pencatatan sipil	75%	0	0
2.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipi	75%	0	0
2.3	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	75%	0	0
2.4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pemenuhan Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	75%	75%	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan adminduk dan capil	75%	0	0
3.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	80%	0	0

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baru mencapai sebesar 44,50 persen. Hampir seluruh program yang ada di Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV dengan keterbatasan anggaran kas yang ada. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Rata-rata Kinerja:		44,50
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDES sesuai Regulasi yang berlaku	100%	0,22%	0,22%
1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memasukan APBDes yang baik dan benar	100%	0,22	0,22%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	0,67%	0,67%
2.1	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan	Persentase Pemberdayaan Lembaga	100%	0,67%	0,67%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten / Kota Serta Pemberdayaan masyarakat Hk. Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/ Kota	Kemasyarakatan Desa			

Sumber : DPMD Bolmut, 2024

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru mencapai sebesar 31,99 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Sebagian besar pendanaan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik dan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Urusan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			Rata-rata Kinerja:		33,19
1	PROGRAM PENGENDANDALIAN PENDUDUK	Persentase penyusunan dokumen kependudukan	100%	33,70%	33,70%
1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pengendalian kuantitas penduduk	90%	33,70%	37,44%
1.3	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Persentase pemetaan	100%	25%	25%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Cakupan Daerah Kab/Kota	pengendalian penduduk			
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif	30%	15%	15%
2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	50%	20%	20%
2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang Diberdayakan	60%	15%	15%
2.3	Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	100%	35%	35%
2.4	Pemberdayaa n dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyaraka tan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peran serta organisasi kemasyaraka tan dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100%	47%	47%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kader poktan dan bina keluarga	50%	60%	60%
3.1	Pelaksanaan Pembanguna n Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	50%	15%	15%

Sumber : DPPKBPPPA Bolmut, 2024

15. Perhubungan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Perhubungan baru mencapai sebesar 37 persen. Program unggulan untuk urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Perkembangan kinerja pembangunan urusan Perhubungan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERHUBUNGAN			Rata-rata Kinerja:		37
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	40,00	15,00	37,00
		Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	47,00	15,00	32,00
1.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya pemenuhan saran dan prasarana jalan	100,00	25,00	25,00
1.2	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase implementasi peraturan dan regulasi yang berlaku untuk keselamatan lalu lintas	0,00	0,00	0,00
1.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kemudahan dan ketersediaan angkutan umum	2,00	0,00	0,00

Sumber : Dishub Bolmut, 2024

16. Komunikasi dan Informatika

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika baru mencapai sebesar 58,50 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program tersebut akan dilaksanakan pada Triwula III dan Triwulan IV. Adapun perkembangan kinerja pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Rata-rata Kinerja:		58,50
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan komunikasi media	75%	73%	97%

No. (1)	Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
		massa dan informasi			
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Yang di Sebarluaskan oleh pemerintah daerah dan media yang terverifikasi pemerintah daerah	300	250	83%
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	100%	20%	20%
2.1	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase OPD yang telah terhubung dengan Jaringan Internet Pemerintah daerah	100%	20%	20%
Sumber : Diskominfo Bolmut, 2024					

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Triwulan II Implementasi Program penagwasan dan pemeriksaan koperasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dana untuk kegiatan tersebut. Begitu halnya dengan program Pemberdayaan UMKM yang merupakan kegiatan pengembangan kapasitas pelaku UMKM. Kedua program tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun berjalan sehingga kinerja kedua program ini akan terlihat pada akhir tahun berjalan. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
URUSAN URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			Rata-rata Kinerja:		0
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	20,00	0	0

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan akuntabel	1,00	0	0
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pengembangan UMKM	100,00	0	0
2.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang meningkat omzet	10,00	0	0

Sumber : Disperindag Bolmut, 2024

18. Penanaman Modal

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Penanaman Modal baru mencapai sebesar 44,78 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program-program dimaksud baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengampu program. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Penanaman Modal sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PENANAMAN MODAL			Rata-rata Kinerja: 44,78		
1	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	100%	0	0
1.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal	1	-	-
2	PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan	100%	50,00	50,00

No. (1)	Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
		Promosi Penanaman Modal			
2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang berinvestasi	5	2	40%
3	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan	50%	8,91%	56%
3.1	Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%	75,3%	75,3%
4	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	65%	65%
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	65%	65%
5	PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara elektronik	100%	100%	100%
5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%

Sumber : DPMPTSP Bolmut, 2024

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga telah mencapai sebesar 76,31 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga s.d Triwulan II
Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			Rata-rata Kinerja: 76,31		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	84%	80%	95%
1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda Yang Memiliki KeterampilanPresentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	26%	-	-
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7	1	14,29%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Organisasi Olahraga yang Aktif	92,86%	92,86%	100%
2.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35,71%	28,57%	80,01%
2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	15	60%
2.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	26,67%	-	-
2.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	90%	-	-
3	PROGRAM PENGEMBANGAN	Presentase Anggota Pramuka Berprestasi	100%	-	-

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	10,42	0	0

Sumber : Dispora Bolmut, 2024

20. Statistik

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Statistik 0 persen. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan program untuk menunjang urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana secara rutin kegiatan ini dilaksanakan pada medio September tahun berjalan sehingga kinerja kegiatan nanti akan terlihat pada akhir tahun anggaran. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Statistik sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Urusan Statistik s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN STATISTIK			Rata-rata Kinerja: 0,00		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang akurat dan terukur	100%	-	-
1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersedia dalam Single Data System	1000	-	-

Sumber : Diskominfo Bolmut, 2024

21. Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi merupakan satu-satunya program untuk menunjang pelaksanaan urusan Persandian di Bolaang Mongondow Utara. Kinerja program ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya yang

dimiliki, khususnya Sandiman. Disisi lain ketersediaan alokasi anggaran untuk menunjang program ini sangat terbatas. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Persandian sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Urusan Persandian s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERSANDIAN			Rata-rata Kinerja: 0,00		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pemenuhan Dokumen yang di Sandikan untuk Kemanan Informasi	30%	-	-
1.1	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Persentase Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	30%	-	-
<i>Sumber : Diskominfo Bolmut, 2023</i>					

22. Kebudayaan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Kebudayaan baru mencapai sebesar 55,35 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Kebudayaan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEBUDAYAAN			Rata-rata Kinerja: 55,35		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan	65,14	47,67	73,19
1.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya	Jumlah Kebudayaan Lokal yang Dikelola	26	172	661,54%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
1.2	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	15	3	20%
2	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Data Sejarah yang Ditata	50%	25%	50%
2.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen sejarah yang di kelola	7	2	28,57
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	25,46	10,91	42,85
3.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Benda Budaya yang Ditetapkan sebagai Cagar Budaya	10	6	60
3.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikelola	4	2	50
Sumber : Dikbud Bolmut, 2024					

23. Perpustakaan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Perpustakaan baru mencapai sebesar 13,65 persen. Program Pembinaan Perpustakaan merupakan program yang menunjang pelaksanaan urusan Perpustakaan di Bolaang Mongondow Utara. Pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mengeluarkan kebijakan untuk setiap ASN yang melaksanakan tugas luar daerah agar membeli dan membawa buku ketika pulang untuk kemudian dijadikan bacaan di perpustakaan-perpustakaan yang ada. Perkembangan kinerja pembangunan urusan kesehatan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERPUSTAKAAN			Rata-rata Kinerja: 13,65		
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan	18,9%	2,58%	13,65%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengunjung Perpustakaan			
1.1	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba bertutur	15%	-	-
1.2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	1800	245	13,65%

Sumber : DPKDBolmut, 2024

24. Kearsipan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Kearsipan masih 0,00 persen pada Program Pengelolaan Arsip yang merupakan satunya program di bidang kearsipan dalam menunjang kinerja Dinas Perpustakaan. Program ini direncanakan triwulan IV tahun ini sehingga capaian kinerja program ini akan terlihat pada akhir tahun.

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEARSIPAN			Rata-rata Kinerja: 0,00		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	71,43	-	-
1.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan Arsip sesuai standar ANRI	10,00	-	-
1.2	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kearsipan	60,00	-	-

Sumber : DPKDBolmut, 2024

25. Kelautan dan Perikanan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan sudah banyak yang terealisasi. Bahkan ada beberapa kegiatan yang realisasinya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk beberapa kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap rendahnya kinerja urusan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan II Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			Rata-rata Kinerja:		48,89
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	5700	2169	38,05
1.1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab / Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang mandiri	2800	0,00	0,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	203,00	44,00	21,67
2.1	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentaase Kelompok Pembudidaya yang memperoleh Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	16,00	30,00	187,5
2.2	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah luas potensi lahan budidaya yg terkelola.	50,00	50,00	100,00
Sumber : DKP Bolmut, 2024					

26. Pariwisata

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pariwisata baru mencapai sebesar 24,40 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada *Program Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata*. Sebagian besar kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV, khususnya kegiatan festival budaya dan *Boulo-Vuyu* yang saat ini sedang berlangsung. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pariwisata sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PARIWISATA			Rata-rata Kinerja:		24,40
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	48,00	48,00
2	Program Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00	2,00	2,00
3	Program Pemasaran Pariwisata	Capaian Peningkatan Pemasaran Event Pariwisata Pemerintah Daerah	100,00	37,00	37,00
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Fasilitas Pemasaran Produk Ekonomi kreatif	100,00	24,00	24,00
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Aktif	100,00	11,00	11,00
Sumber : Dispar Bolmut, 2023					

27. Pertanian

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pertanian telah mencapai 50,42 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program ini akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV, baik yang terdapat di Dinas Pertanian maupun Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di semua kecamatan. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pertanian sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27

Capaian Kinerja Urusan Pertanian s.d Triwulan II Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERTANIAN			Rata-rata Kinerja:		50,42
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan	72,00	25,00	35,00

No (1)	Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
	PRASARANA PERTANIAN	penyediaan prasarana pertanian			
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Luas areal lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	72,74	0,00	0,00
1.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	35,00	0,00	0,00
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman Pangan	100,00	48,00	48,00
2.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	34,23	4,35	13,00
2.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	38,45	2,08	5,00
2.3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Efisiensi Reproduksi (CR)	77,00	3,00	3,90
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penurunan serangan OPT Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan	30,00	15,00	50,00
3.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase Luas areal yang terkendali dari Bencana	0,33	0,15	45,00
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	83,00	42,00	51,00
4.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian	66,36	33,4	50,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kesehatan hewan dan kesmavet	9,00	5,00	56,00
5.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak yang mengalami gangguan penyakit menurunmenurun	4,00	2,00	50,00
5.2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Persentase keluar masuk ternak yang terawasi	92,00	45,00	49,00

No (1)	Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
	dan Produk Hewan Daerah Kab/Kota				
5.3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Ternak yang mendapatkan pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	25,42	13,00	51,00

Sumber : Distan Bolmut, 2024

28. Kehutanan

Kinerja program pembangunan urusan Kehutanan telah mencapai sebesar 96,11 persen. *Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)* merupakan program untuk menunjang pelaksanaan urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seringkali kinerja pencapaian target program ini terkendala dengan kewenangan yang dimiliki kabupaten/kota. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Kehutanan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan s.d Triwulan II Tahun 2024

Indikator Program dan Kegiatan			Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEHUTANAN			Rata-rata Kinerja:		0
1.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Peningkatan konservasi lingkungan hidup	50,00	0,00	0,00
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	Persentase Luas Tutupan lahan yg bertambah	0,30	0,00	0,00

Sumber : DLH Bolmut, 2024

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menyebabkan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dapat dilaksanakan akibat adanya perubahan kewenangan di daerah, hanya bersifat monitoring dan pelaporan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab pelaksanaan urusan ini di daerah agak sulit untuk di ukur.

30. Perdagangan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Perdagangan baru mencapai sebesar 14,28 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini merupakan program peningkatan kapasitas pasar yang bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Perdagangan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan s.d Triwulan II Tahun 2024

No		Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	Target	Realisasi	Capaian	
URUSAN PERDAGANGAN			(4)	(5)	(6)	
			Rata-rata Kinerja:		14,28	
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	30,00	0	0	
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar Rakyat yang ditata	3,00	0	0	
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	0,17	0	0	
2.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar yang dilaksanakan	4,00	0	0	
3	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	28,00	12,00	42,86	
3.1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengaawsan	Jumlah UTTP yang bertanda Tera Sah	250,00	31,00	12,40	
Sumber : Dinas Perdagangan Bolmut, 2024						

31. Perindustrian

Sebagaimana pelaksanaan urusan Perdagangan, urusan Perindustrian yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengalami permasalahan yang sama. Permasalahan dimaksud adalah keterbatasan

anggaran, seringkali kepastian alokasi dari pemerintah pusat ditetapkan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan sehingga pemerintah daerah sulit untuk mengambil langkah antisipasi. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Perindustrian sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERINDUSTRIAN			Rata-rata Kinerja:		0
1	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Sentra Industri Aktif	25,00	0	0
1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RPIK yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah	1,00	0	0

Sumber : Dinas Perdagangan Bolmut, 2024

32. Transmigrasi

Kinerja program pembangunan urusan Transmigrasi belum tergambar pada RKPD induk tahun 2024, hal ini diakibatkan oleh pelaksanaan urusan Transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi fokus kepada penyelesaian sengketa lahan transmigrasi. Penyelesaian ini menyebabkan alokasi anggaran pelaksanaan pelatihan bagi transmigran sebagian dialihkan untuk pelaksanaan pendampingan dimaksud.

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi s.d Triwulan II Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN TRANSMIGRASI			Rata-rata Kinerja:		00,00
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase KK Transmigrasi Yang berhasil mendapatkan sertifikat	0,00	0,00	0,00
1.1	Pengembangan Satuan Prmukiman Pada Tahap Kemandirian	Jumlah KK yang di mendapatkan	0,00	0,00	0,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pendampingan hukum			
2	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penyelesaian temuan lapangan	60,00	0,00	0,00
2.1	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota	Persentase temuan lapangan hasil monitoring yang ditindak lanjuti	100,00	0,00	0,00

Sumber : Disnakertrans Bolmut, 2024

33. Sekretariat Daerah

Rata-rata kinerja Sekretariat Daerah telah mencapai sebesar 57,43 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada *Program Perekonomian dan Pembangunan*. program ini merupakan program pengendalian realisasi program dan anggaran yang dilaksanakan regular setiap triwulan sehingga kinerja program ini optimis akan tercapai diatas 90,00 persen. Perkembangan kinerja pembangunan Sekretariat Daerah sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SEKRETARIAT DAERAH			Rata-rata Kinerja: 57,43		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100,00	38,00	38,00
		Persentase Penetapan dan pengesahan peraturan dan penyelesaian perkara	100,00	38,00	38,00
		Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100,00	38,00	38,00
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi kegiatan perekonomian dan Pembangunan	100,00	28,00	28,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100,00	63,00	63,00

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00

Sumber : Setda Bolmut, 2024

34. Sekretariat DPRD

Rata-rata kinerja Sekretariat Daerah baru mencapai sebesar 30,00 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada kegiatan Persentase penetapan ranperda mejadi perda, kegiatan Presentase penyerapan aspirasi/pengaduan masyarakat yang ditindalanjuti dan kegiatan Presentase Pelaksanaan kegiatan rapat Alat Kelengkapan Dewan/ AKD. Ketiga kegiatan tersebut masih belum ada realisasi karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Perkembangan kinerja pembangunan Sekretariat DPRD sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SEKRETARIAT DPRD			Rata-rata Kinerja:		30,00
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00	30,00	30,00
1.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Dokumen Penyusunan,Pembahasan dan Kajian Peraturan Per undang-Undangan yang di tetapkan	100,00	40,00	40,00
1.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penetapan ranperda mejadi perda	100,00	0,00	0,00
1.3	Pengaawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Hearing/RDP DPRD yang dilaksanakan	100,00	40,00	40,00
1.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Kegiatan peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	100,00	80,00	80,00
1.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase penyerapan aspirasi/pengaduan masyarakat yang ditindalanjuti	100,00	0,00	0,00

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Presentase Pelaksanaan kegiatan rapat Alat Kelengkapan Dewan/ AKD	100,00	0,00	0,00
1.7	Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	100,00	50,00	50,00
Sumber : Setwan Bolmut, 2024					

35. Perencanaan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Perencanaan baru mencapai angka 33,33 persen. Fluktuasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan yang bersifat *imperative* oleh pemerintah pusat menjadi faktor utama kondisi ini terjadi. Walaupun penyusunan RKPD 2025, RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 direncanakan dilaksanakan pada triwulan I dan triwulan II tahun 2024, namun kebijakan terbaru mensyaratkan semua dokumen perencanaan tersebut disusun berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2024. Koordinasi yang intens dan optimalisasi pengendalian yang dilakukan diharapkan mampu mendongkrak kinerja urusan perencanaan sebagaimana yang diharapkan. Adapun Perkembangan kinerja pembangunan urusan Perencanaan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERENCANAAN			Rata-rata Kinerja: 33,33		
1	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian target perencanaan pembangunan daerah (persen)	74,00	0,00	0,00
		Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (persen)	100,00	100,00	100,00
1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (persen)	100,00	35,71	35,71
1.2	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Nilai hasil evalauasi perencanaan dan penganggaran (persen)	100,00	62,50	62,50

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.3	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Capaian Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah (persen)	100,00	0,00	0,00
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	94,58	0,00	0,00
2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kinerja OPD bidang Pemerintahan dan PM (persen)	95,51	0,00	0,00
2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kinerja OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (persen)	95,54	0,00	0,00
2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kinerja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	92,70	0,00	0,00

Sumber : Bapelitbangda Bolmut, 2024

36. Keuangan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Keuangan telah mencapai sebesar 87,01 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada *Program Pengelolaan Keuangan Daerah*. program ini terkait dengan ambang batas penetapan defisit dalam Perubahan APBD TA. 2024 dimana masih berada pada angka 8,02 persen, 3,00 persen lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni maksimal 5,00 persen. Kondisi ini diakibatkan oleh tahapan perhelatan PILKADA serentak yang membutuhkan alokasi yang tidak sedikit sehingga mengharuskan belanja daerah mengalami peningkatan. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Keuangan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35

Capaian Kinerja Urusan Keuangan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEUANGAN			Rata-rata Kinerja:		87,01
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Batas maksimal defisit APBD	5,00	8,02	62,34
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ratio pendapatan dan belanja	100,00	92,51	92,51
1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase SP2D yang diterbitkan melalui daftar penguji	100,00	60,00	60,00
1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyajikan seluruh aspek pelaporan dengan berkualitas	100,00	60,00	60,00
1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D BTT, Bankeu, Bagi Hasil yang diterbitkan sesuai standar	100,00	100,00	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan	91,43	100,00	109,37
2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	presentase OPD yang mengintegrasikan Simda BMD dengan Simda Keuangan	100,00	100,00	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	10,00	8,93	89,30
3.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian pajak daerah	100,00	100,00	100,00
Sumber : BPKD Bolmut, 2024					

37. Kepegawaian

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Kepegawaian baru mencapai sebesar 118,13 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dikarenakan sebagian besar kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Kepegawaian sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36

Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEPEGAWAIAN			Rata-rata Kinerja:		118,13
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN	60,00	70,88	118,13
		Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	100	100	100
1.1	Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase updating data kepegawaian	100	99,24	99,24
1.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai kebutuhan	98,00	96,67	98,64
1.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan kompetensi ASN	100	0	0
1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang memenuhi penilaian kinerja	2545	1928	75,75
Sumber : BKPP Bolmut, 2024					

38. Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia belum ada realiasi dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III ini Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pendidikan dan Pelatihan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			Rata-rata Kinerja:		0,00
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi JPT, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	100,00	0,00	0,00
1.1	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase pengembangan kompetensi JPT, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	100,00	0,00	0,00
Sumber : BKPP Bolmut, 2024					

39. Penelitian dan Pengembangan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Penelitian dan Pengembangan baru mencapai angka 9,63 persen. Dalam Renja Bapelitbangda Tahun 2024 memang perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Indeks Inovasi Daerah (IDD) direncanakan dilaksanakan pada triwulan III, sehingga dapat dimaklumi output kedua kegiatan tersebut dapat diukur pada akhir tahun 2024. Namun, bila melihat progress sub kegiatan pendukung keduanya *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah* optimis dicapai diatas 61,32 persen sebagaimana ditargetkan dalam Renja Bapelitbangda tahun 2024. Adapun perkembangan kinerja pembangunan urusan Penelitian dan Pengembangan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan II
Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Rata-rata Kinerja:		9,63
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi/penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah (persen)	0,63	0,00	0,00
		Persentase kematangan inovasi (persen)	83,33	0,00	0,00
1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian yang dihasilkan (dokumen)	2,00	1,00	50,00
1.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pemenuhan indikator inovasi daerah (persen)	87,01	0,00	0,00
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	28,90	28,90
2.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	45,45	45,45

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00	50,00	50,00
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00	0,00	0,00
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100,00	56,25	56,25
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	0,00	0,00
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	12,50	12,50
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	38,10	38,10

Sumber : Bapelitbang Bolmut, 2024

40. Pengawasan

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pengawasan telah mencapai angka 72,43 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Penyelenggaraan Pengawasan. Sebagian besar kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan Triwulan II rata-rata masih dalam proses pengerjaan. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pengawasan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Urusan Pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PENGAWASAN			Rata-rata Kinerja:		73,97
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	93,00	48,49	52,14
1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase hasil pengawasan	93,00	59,95	64,46
1.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	90,00	37,03	41,14

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93,00	113,89	122,46
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	100
2.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan asistensi koordinasi, monitoring dan evaluasi	93,00	127,77	137,39

Sumber : Itda Bolmut, 2024

41. Kewilayahan

Urusan Kewilayahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan oleh 6 (enam) Kantor Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana program kegiatan sebagian besar merupakan program/kegiatan penunjang urusan pemerintahan dan kegiatan rutin meskipun capaian terendah ada di Kecamatan Bolangitang Barat dia angka 32 persen namun pencapaian kinerjanya optimis dapat dicapai di akhir tahun untuk semua kecamatan. Perkembangan kinerja pembangunan urusan kesehatan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEWILAYAHAN			Rata-rata Kinerja:		49,75
1	KANTOR CAMAT SANGKUB	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100,00	38,00	38,00
2	KANTOR CAMAT BINTAUNA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100,00	54,89	54,89
3	KANTOR CAMAT BOLANGITANG TIMUR	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100,00	46,77	46,77
4	KANTOR CAMAT BOLANGITANG BARAT	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100,00	32,00	32,00

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	KANTOR CAMAT K AidIPANG	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100,00	49,04	49,04
6	KANTOR CAMAT PINOGALUMAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100,00	51,00	51,00
Sumber : Kantor Camat se-Bolmut, 2024					

42. Pemerintahan Umum

Rata-rata kinerja program pembangunan urusan Pemerintahan Umum baru mencapai sebesar 53,47 persen. Capaian kinerja paling rendah terdapat pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan angka capaian masih nol. Program ini pelaksanaannya pada triwulan III dan IV, sehingga target program ini optimis dapat dicapai sampai akhir tahun 2024. Perkembangan kinerja pembangunan urusan Pemerintahan Umum sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Rata-rata Kinerja: 53,47		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kesadaran Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,15	1,15	100,00
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Minat Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	267,00	267,00	100,00
2	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan	100,00	60,00	60,00

No. (1)	Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2023		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
	Pendidikan Politik dan Pengembangan	Politik dan Pengembangan			
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partai politik yang melakukan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100,00	60,00	60,00
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100,00	0	0
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak dalam penanganan konflik sosial	100,00	0	0

Sumber : Kesbangpol Bolmut, 2024

2.2. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan pada APBD tahun 2024 sampai dengan triwulan II, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II pada seluruh urusan relative masih rendah;
- 2. Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pembangunan

fisik/infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa masih terkendala proses pelelangan yang cukup memakan waktu yang lama serta mekanisme evaluasi bulanan belum optimal; dan

3. Kinerja program/kegiatan sangat dipengaruhi oleh arus kas daerah, teridentifikasi beberapa program/kegiatan di SKPD tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran pada kas daerah padahal telah direncanakan pada anggaran kas dan tercantum dalam DPA-SKPD TA. 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA);
2. Perubahan APBD TA. 2024 perlu difokuskan kepada program/kegiatan prioritas yang secara kumulatif dapat memberikan akselerasi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPD 2024-2026; dan
3. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran secara umum. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap SKPD, tetapi juga terhadap arus kas daerah secara keseluruhan untuk memastikan program/kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu secara efektif dan efisien.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI SULAWESI UTARA

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi. Kebijakan ini didasarkan pada upaya untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, serta dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, strategi pembangunan tahun 2024 akan mengedepankan pendekatan yang holistik dan terpadu, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 adalah penguatan sektor ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk domestik, dan memperluas pasar ekspor. Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan mempercepat transformasi digital.

Di sisi sosial, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah akan terus mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga akan didukung melalui berbagai program perlindungan sosial yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Dalam aspek lingkungan, kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 akan memperkuat upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah berencana untuk memperluas area konservasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mengembangkan energi terbarukan sebagai bagian

dari komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan terus didorong untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing. Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

3.1.2. Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemanfaatan potensi sumber daya alam, pengembangan sektor pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi provinsi, seperti ketimpangan ekonomi antar wilayah, pengangguran, dan kemiskinan, sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Salah satu prioritas utama adalah pengembangan sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta mempromosikan potensi wisata budaya dan alam secara lebih agresif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Di sektor pertanian dan perikanan, kebijakan pembangunan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk lokal. Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan berupa pelatihan, penyediaan teknologi modern, serta akses pembiayaan bagi petani dan nelayan. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan juga akan didorong untuk meningkatkan daya saing produk di pasar nasional dan internasional.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024.

Pemerintah provinsi akan memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan fasilitas pendidikan, kualitas pengajaran, serta akses yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, program kesehatan yang lebih komprehensif akan dijalankan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam aspek lingkungan, kebijakan pembangunan akan menekankan pada perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. Pemerintah provinsi akan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, mempromosikan praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta mendorong penggunaan energi terbarukan. Upaya ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak lingkungan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah provinsi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan memperkuat kualitas sumber daya manusia, Sulawesi Utara diharapkan dapat menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera, serta mampu bersaing di kancah nasional maupun global.

3.2. KERANGKA PERUBAHAN EKONOMI DAERAH

3.2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga yang ditargetkan tahun 2024 menunjukkan pola pemulihan yang signifikan setelah dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ekonomi mengalami kontraksi besar dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,71%. Hal ini mencerminkan dampak serius pandemi yang mengganggu berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

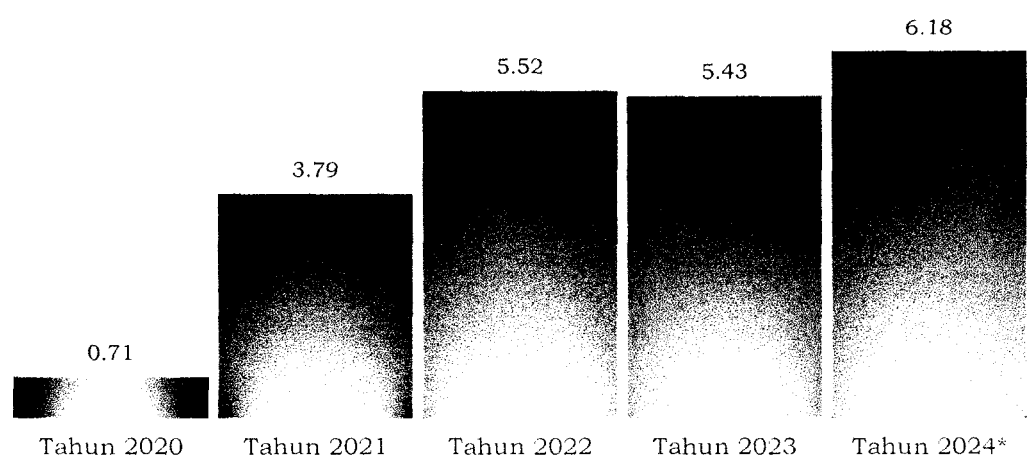
Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan angka sebesar 3,79%. Meskipun masih jauh di bawah tingkat sebelum pandemi, peningkatan ini mencerminkan adaptasi masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap kondisi baru serta efektivitas langkah-langkah pemulihan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Tahun 2022 menandai percepatan pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan mencapai 5,52%. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah pulih lebih kuat, didukung oleh peningkatan aktivitas di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata,

pertanian, dan perdagangan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik juga berkontribusi positif terhadap pemulihan ini.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 5,43%, namun tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi. Hal ini mungkin mencerminkan penyesuaian terhadap normalisasi ekonomi pasca-pandemi, di mana berbagai sektor ekonomi mulai stabil setelah periode pemulihan yang cepat.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2024
(*) Target Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Melihat ke depan, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 6,18%. Target ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperkuat fondasi ekonomi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

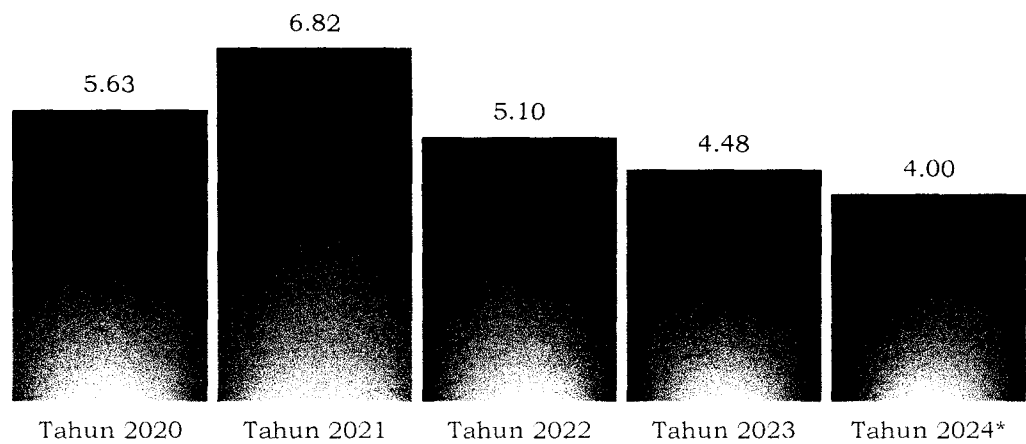
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga target tahun 2024 menunjukkan perjalanan pemulihan yang progresif. Meskipun mengalami kontraksi signifikan pada awal pandemi, ekonomi daerah ini berhasil bangkit dan tumbuh lebih kuat, dengan proyeksi yang optimis untuk masa depan.

3.2.2. Proyeksi Ketenagakerjaan

Data capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam konteks ekonomi daerah. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 5,63%. Angka ini mencerminkan situasi ekonomi yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyaknya kehilangan pekerjaan di berbagai sektor.

Pada tahun 2021, TPT mengalami peningkatan tajam menjadi 6,82%. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi, di mana banyak perusahaan dan sektor ekonomi masih berjuang untuk pulih. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap kebijakan penanganan pandemi juga mempengaruhi pasar tenaga kerja secara signifikan.

Grafik 3.2
Ketenagakerjaan (TPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2024
(*) Target Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan TPT menjadi 5,10%. Penurunan ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi, meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung sektor usaha mulai membuahkan hasil, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi.

Tahun 2023 mencatat penurunan lebih lanjut pada TPT menjadi 4,48%. Angka ini mencerminkan peningkatan stabilitas ekonomi dan efektivitas

program pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan lapangan kerja di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, turut berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran.

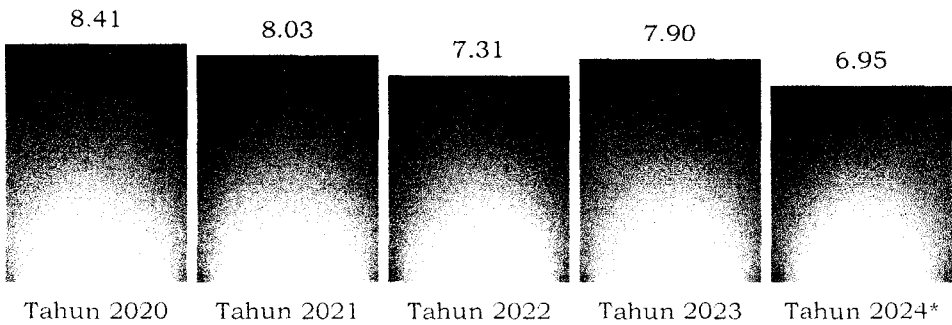
Proyeksi TPT pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 4,00%. Target ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan terus mendorong penciptaan lapangan kerja. Berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta peningkatan investasi, diharapkan dapat mendukung tercapainya target ini.

Realisasi capaian TPT di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2024 menunjukkan upaya pemulihan ekonomi yang bertahap namun konsisten. Meskipun sempat mengalami peningkatan signifikan pada awal pandemi, TPT berhasil ditekan secara bertahap melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.3. Proyeksi Kemiskinan

Terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga proyeksi akhir tahun 2024. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan berada pada angka tertinggi yaitu 8,41%. Ini menandakan bahwa pada tahun tersebut, hampir 8,5% dari populasi di kabupaten ini hidup di bawah garis kemiskinan.

Grafik 3.3
Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2024
(*) Target Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Pada tahun 2021, terjadi penurunan kecil dalam tingkat kemiskinan menjadi 8,03%. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan, ini menunjukkan adanya upaya yang mulai membuahkan hasil dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana tingkat kemiskinan turun lebih jauh menjadi 7,31%. Penurunan ini lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan.

Namun, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan sedikit meningkat menjadi 7,90%. Meskipun demikian, proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan optimisme dengan perkiraan penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 6,95%. Jika proyeksi ini tercapai, maka akan ada penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat kemiskinan selama periode lima tahun ini.

Secara keseluruhan, data diatas menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi, tren umum menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3.2.4. Proyeksi Ketimpangan Pendapatan

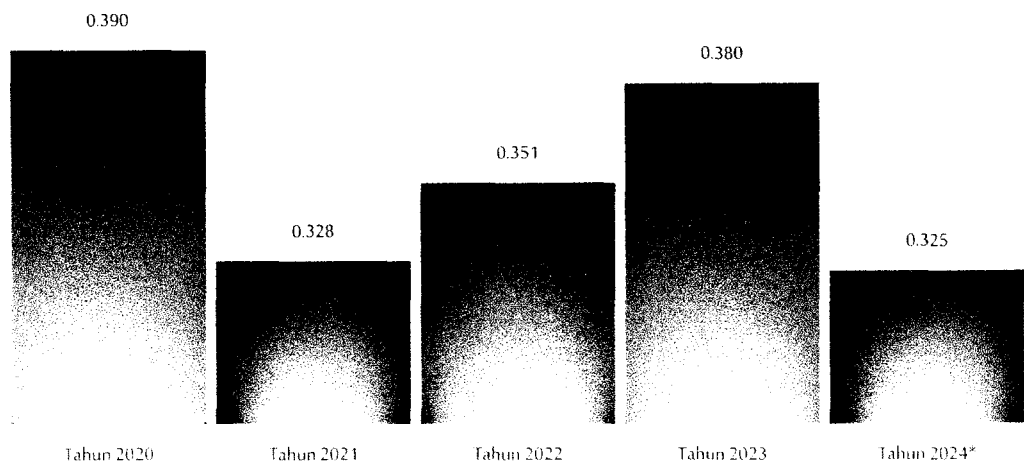
Grafik yang ditampilkan menunjukkan perubahan Rasio Gini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga proyeksi akhir tahun 2024. Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Pada tahun 2020, Rasio Gini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tercatat sebesar 0,328. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2021, Rasio Gini meningkat menjadi 0,351, yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam struktur ekonomi, kebijakan fiskal, atau pergeseran dalam distribusi pendapatan.

Pada tahun 2022, Rasio Gini tetap stabil di sekitar 0,351, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak mengalami perubahan signifikan selama tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023, Rasio Gini mencapai

puncaknya di 0,390. Peningkatan ini mungkin mencerminkan dampak dari berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti perubahan dalam pasar tenaga kerja, inflasi, atau kebijakan ekonomi yang tidak merata.

Grafik. 3.4
Gini Rasio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2024
(*) Target Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan penurunan Rasio Gini menjadi 0,325. Penurunan ini mencerminkan harapan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan akan berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan. Proyeksi ini juga menunjukkan optimisme bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan membuahkan hasil yang positif.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan, ada harapan untuk perbaikan di masa depan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ini dan untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.3. KERANGKA PERUBAHAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka perubahan keuangan daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan langkah strategis yang dirancang untuk menyesuaikan alokasi anggaran

dengan kondisi dan kebutuhan terbaru. Proses ini mencakup evaluasi terhadap pencapaian anggaran tahun sebelumnya, identifikasi prioritas pembangunan yang baru, serta penyesuaian alokasi anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah.

Langkah pertama dalam kerangka perubahan keuangan daerah adalah evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun berjalan. Pemerintah daerah melakukan analisis terhadap penggunaan anggaran di berbagai sektor untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta peluang perbaikan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan sektor-sektor yang memerlukan peningkatan alokasi anggaran atau penyesuaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, penentuan prioritas pembangunan menjadi fokus utama dalam kerangka perubahan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan peninjauan terhadap isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Hal ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Proses penyesuaian alokasi anggaran juga mencakup identifikasi sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, peningkatan layanan pajak dan retribusi, serta menggali potensi-potensi ekonomi lokal yang belum tergarap secara optimal. Selain itu, pemerintah juga berupaya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

Kerangka perubahan keuangan daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

Dengan kerangka perubahan keuangan daerah yang komprehensif, diharapkan Perubahan RKPD Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menjadi dokumen perencanaan yang lebih responsif, adaptif, dan efektif. Proses ini tidak hanya memastikan alokasi anggaran yang tepat

sasaran, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

3.3.1. Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, Kerangka Keuangan Daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada Pendapatan, namun pada sisi Belanja mengalami perubahan sehingga mengakibatkan perubahan pada Pembiayaan. Perubahan Belanja dikarenakan penyesuaian dan penambahan pada belanja barang, jasa, modal dan juga perubahan Pembiayaan dikarenakan penyesuaian untuk membiayai belanja SiLPA tahun 2023 yang telah diaudit. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada rencana anggaran di tabel berikut.

Tabel 3.5
Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	P-APBD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	623.344.678.133	623.344.678.133
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.465.091.599	23.465.091.599
4.1.01	Pajak Daerah	6.020.000.000	6.020.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	14.675.091.599	14.675.091.599
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000	800.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.970.000.000	1.970.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	597.379.586.534	597.379.586.534
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	572.076.141.000	572.076.141.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.303.445.534	25.303.445.534
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.500.000.000	2.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000.000	2.500.000.000
5	BELANJA	650.425.103.890	658.311.499.852
5.1	BELANJA OPERASI	463.283.894.794	471.232.754.656
5.1.01	Belanja Pegawai	256.304.796.991	263.858.179.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.890.146.575	170.400.377.608
5.1.04	Belanja Subsidi	70.000.000	70.000.000

Kode	Uraian	APBD 2024	P-APBD 2024
5.1.05	Belanja Hibah	33.302.951.228	34.702.876.228
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.716.000.000	2.201.321.440
5.2	BELANJA MODAL	68.419.445.796	68.356.981.896
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.700.000.000	1.697.214.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.778.124.146	8.910.382.146
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.291.942.011	23.246.381.711
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.870.827.872	32.824.452.272
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.253.551.767	1.253.551.767
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	525.000.000	425.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	117.721.763.300	117.721.763.300
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	988.425.000	988.425.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.733.338.300	116.733.338.300
	Total Surplus/(Defisit)	(27.080.425.757)	(34.966.821.719)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.080.425.757	34.966.821.719
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.080.425.757	34.966.821.719
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	27.080.425.757	34.966.821.719
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
6.2.01	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Pembiayaan Netto	27.080.425.757	34.966.821.719
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0

3.3.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kondisi ideal pendapatan daerah dalam pembiayaan belanja daerah terjadi ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencukupi untuk membiayai sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan belanja daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan kemandirian finansial suatu daerah yang penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pertama, PAD yang mencukupi memungkinkan

pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Mereka dapat fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta program sosial yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kedua, kemandirian finansial ini juga berarti pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi, seperti penurunan transfer dari pemerintah pusat atau fluktuasi pendapatan dari sektor-sektor tertentu. Ketiga, dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko dalam mengelola utang dan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman atau investasi yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang. Terakhir, kondisi ideal ini juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah, memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta, serta meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan daerah. Secara keseluruhan, pendapatan daerah yang ideal dalam pembiayaan belanja daerah adalah ketika PAD mencukupi untuk memungkinkan pemerintah daerah beroperasi secara mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah. PAD merupakan salah satu sumber utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kegiatan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa sumber utama PAD antara lain adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan barang milik daerah dan hasil usaha daerah.

Pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha tertentu, seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan sebagainya.

Sementara itu, hasil penjualan barang milik daerah mencakup penjualan aset tetap atau tidak bergerak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan hasil usaha daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan memiliki PAD yang cukup, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara mandiri tanpa terlalu banyak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang efektif dan transparan menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensial untuk ditingkatkan. Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak, meningkatkan pengawasan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan.
- b. Kedua, diversifikasi sumber pendapatan dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Misalnya, mengembangkan pariwisata dengan membangun infrastruktur yang mendukung dan mengenakan retribusi atas layanan yang diberikan kepada wisatawan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
- c. Ketiga, memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD melalui peningkatan kinerja operasional dan manajerial. BUMD dapat mengelola sektor-sektor strategis seperti air minum, energi, transportasi, dan lain-lain.
- d. Keempat, mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan bagi

daerah yang dapat menghasilkan pendapatan dari penjualan tanah atau pajak properti.

- e. Kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor. Dengan demikian, implementasi strategi-strategi ini secara komprehensif dapat membantu daerah meningkatkan PAD dan menciptakan kemandirian finansial yang berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp23.465.091.599 atau sama dengan anggaran PAD pada APBD murni tahun 2024 dengan rincian pendapatan pajak daerah Rp6.020.000.000,00, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp14.675.091.599, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp800.000.000,00 dan Lain lain PAD Yang Sah Rp1.970.000.000,00.

2) Pendapatan Transfer

Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk Pendapatan Transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2023 belum mengalami perubahan sehingga tidak mempengaruhi kebijakan anggaran yang bersumber dari dana transfer dan bagi hasil serta lain-lain pendapatan yang sah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan RKPD Tahun 2024 belum mengalami perubahan, tetap sama dengan APBD Murni Tahun 2024 yakni dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 untuk pendapatan dana kapitasi JKN.

3.3.3. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU) dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- 5) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;
- 6) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan

- pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- 7) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, termasuk didalamnya *mandatory spending* dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
 - 8) Penyesuaian rincian belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang besaran PPh 21 Pada belanja pegawai;
 - 9) Penyesuaian belanja berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang juknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2024;
 - 10) Penyesuaian belanja berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 11) Penyesuaian belanja berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2024;
 - 12) Penyesuaian anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024; dan
 - 13) Penyesuaian belanja berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 900.1.9.1/948/SJ hal percepatan pencairan hibah pendanaan kegiatan pilkada tahun 2024

3.3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

SILPA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar

Rp.27.080.425.757,00 dan sisa lebih saldo kas daerah pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audited BPK RI sebesar Rp.34.966.821.719,00.

Terhadap selisih lebih atas SILPA hasil Auditet BPK RI, pemerintah daerah telah menggunakan anggaran tersebut dan di tambahkan pada anggaran belanja pegawai. Dan selanjutnya Pembiayaan pada Perubahan RKPD 2024 dilakukan penyesuaian sesuai dengan hasil audit.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan penyusunan prioritas pembangunan lebih diarahkan untuk mengetahui permasalahan pembangunan yang memiliki pengaruh lebih terhadap proses pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat berfungsi untuk dapat mengoptimalkan pendanaan yang bersifat terbatas agar tepat sasaran. Prioritas pembangunan merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang akan diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPD) pada tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan perangkat daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara perencanaan di daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas.

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Utara guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, maka berikut ini disajikan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

Tema RKP 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selanjutnya, tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan Serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu”. Berdasarkan RKP, RKPD

Provinsi Sulawesi Utara, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah: **“Melanjutkan Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing melalui Pemerataan Ekonomi, Reformasi Birokrasi dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan serta Sukses Pemilukada Serentak”**.

4.1. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen RPD 2024-2026 disusun dengan tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada Visi Misi Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tujuan/ Sasaran Pembangunan		Kondisi Akhir
					RKPD 2024	PRKPD 2024	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	68,79 Poin	69,33 Poin	69,33 Poin	70,4 Poin
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	69,70 Persen	71,48 Persen	71,48 Persen	73,20 Persen
			Prestasi Pemuda dan Olah Raga	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai
			Rata-rata Lama Sekolah	8,74 Tahun	8,88 Tahun	8,88 Tahun	9,17 Tahun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tujuan/ Sasaran Pembangunan		Kondisi Akhir
					RKPD 2024	PRKPD 2024	
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	67,97 Tahun	68,10 Tahun	68,10 Tahun	68,36 Tahun
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	44,83 Poin	49,86 Poin	49,86 Poin	60,03 Poin
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	43,13 Poin	48,13 Poin	48,13 Poin	60,13 Poin
			Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	B Predikat	B Predikat	B Predikat	BB Predikat
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat
			Indeks Kepuasan Masyarakat	78,77 Poin	80,5 Poin	80,5 Poin	83,98 Poin
3	Terwujudnya Pemerataan dan Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Angka Kemiskinan	7,25 Persen	6,95 Persen	6,95 Persen	6,35 Persen
			Gini Rasio	0,328 Poin	0,325 Poin	0,325 Poin	0,310 Poin
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,00 Persen	6,18 Persen	6,18 Persen	6,33 Persen
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,98 Persen	3,86 Persen	4,00 Persen	3,07 Persen
			PDRB per Kapita (ADHB)	34.633.314 Rupiah	35.401.1616 Rupiah	35.401.1616 Rupiah	37.936.873 Rupiah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tujuan/ Sasaran Pembangunan		Kondisi Akhir
					RKPD 2024	PRKPD 2024	
4	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Berkelanjutan	66,29 Poin	68,89 Poin	68,89 Poin	70,44 Poin
		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	42,60 Poin	43,79 Poin	43,79 Poin	46,18 Poin
		Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,04 Poin	82,85 Poin	82,85 Poin	83,43 Poin
		Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,35 Persen	80,89 Persen	80,89 Persen	81,92 Persen
		Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	67,16 Persen	68,01 Persen	68,01 Persen	70,23 Persen

Sumber: Bapelitbang Kab. Bolmong Utara, 2024

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan Prioritas pembangunan tahun 2024 dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap upaya sinkroniasi prioritas nasional dan prioritas Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024. prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditentukan agar sasaran pemerintah daerah dapat tercapai. Interkoneksi Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Tahun 2024

Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	
PN1	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PD5	Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran;
PN2	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	PD6	Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan
PN3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan	PD1	Peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan;
		PD2	Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
PN4	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	PD4	Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
PN5	Penguatan daya saing usaha	PD4	Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
PN6	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	PD6	Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan
PN7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	PD3	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
PN8	Pelaksanaan Pemilu 2024	PD3	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;

Sumber: Bapelitbang Kab. Bolmong Utara, 2024

Tabel diatas menggambarkan keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional (PN) dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (PD) pada tahun 2024. Tabel ini menunjukkan bagaimana prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sejalan dengan prioritas daerah, mencerminkan upaya bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan terpadu.

Prioritas Nasional PN1 yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, selaras dengan Prioritas Daerah PD5 yang menekankan pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal ini mencerminkan komitmen daerah untuk mendukung upaya nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas ekonomi.

PN2 yang berfokus pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi selaras dengan PD6, yaitu peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang

yang berwawasan lingkungan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendukung transisi menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

PN3 yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan sejalan dengan PD1 dan PD2. PD1 menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, sementara PD2 fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Keselarasan ini menggarisbawahi pentingnya investasi pada sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan.

PN4 dan PN5, yang berkaitan dengan revitalisasi industri, penguatan riset terapan, dan penguatan daya saing usaha, sejalan dengan PD4 yang menekankan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya untuk memperkuat ekonomi lokal melalui inovasi dan pengembangan industri yang kompetitif.

PN6 yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, selaras dengan PD6, yaitu peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan. Ini menegaskan komitmen daerah dalam memperbaiki infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah yang lebih baik.

PN7 tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PN8 mengenai pelaksanaan Pemilu 2024, selaras dengan PD3 yang fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara siap mendukung kebijakan nasional besar, termasuk proyek strategis nasional dan proses demokrasi, dengan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel diatas menggambarkan bagaimana prioritas pembangunan nasional diterjemahkan dan diimplementasikan pada tingkat daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Keselarasan antara prioritas nasional dan daerah ini menunjukkan upaya sinergis dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 4.3
 Keselarasan Prioritas Provinsi Sulut dan Prioritas Daerah
 Tahun 2024

Prioritas Provinsi Sulut		Prioritas Daerah	
PP1	Pembangunan yang berwawasan lingkungan;	PD6	Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan
PP2	Pemerataan pembangunan;	PD6	Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan
PP3	Penanggulangan kemiskinan;	PD5	Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran;
PP4	Pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata;	PD4	Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
PP5	Peningkatan daya saing perekonomian daerah;	PD4	Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
PP6	Peningkatan daya saing investasi daerah; dan	PD4	Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
PP7	Stabilitas daerah yang terjamin.	PD1	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan;
		PD2	Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
		PD3	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;

Sumber: Bapelitbang Kab. Bolmong Utara, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan keselarasan antara Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara (PP) dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (PD) pada tahun 2024. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat kabupaten, sehingga tercapai sinergi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Prioritas Provinsi Sulut PP1 yang berfokus pada pembangunan yang berwawasan lingkungan selaras dengan Prioritas Daerah PD6, yaitu peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan. Keselarasan ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang.

PP2 tentang pemerataan pembangunan juga sejalan dengan PD6, menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh wilayah kabupaten mendapatkan manfaat dari pembangunan yang adil dan inklusif.

PP3 yang menekankan pada penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan PD5, yang menargetkan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Keselarasan ini mencerminkan fokus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan yang terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu.

PP4 yang mencakup pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, selaras dengan PD4 yang menekankan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan peluang kerja.

PP5 dan PP6, yang berkaitan dengan peningkatan daya saing perekonomian dan investasi daerah, juga sejalan dengan PD4. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi, baik dari dalam maupun luar daerah, guna memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing daerah.

PP7 tentang stabilitas daerah yang terjamin, selaras dengan PD1, PD2, dan PD3 yang masing-masing menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, kualitas layanan kesehatan, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkomitmen untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bagaimana prioritas pembangunan provinsi diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan pembangunan dapat berjalan secara sinergis, efektif, dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 MENURUT SKPD

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif
Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 Menurut SKPD

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2024	P-RKPD 2024	TAMBAH / (KURANG)
-1	-2	-3	-4	-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	155.355.368.443,00	152.021.238.587	(3.334.129.856)
2	DINAS KESEHATAN	104.435.324.385,00	107.263.751.836	2.828.427.451
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46.453.276.342,00	46.608.305.951	155.029.609
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.439.730.414,00	4.352.147.880	(87.582.534)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.464.906.419,00	3.687.204.751	222.298.332
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.400.838.348,00	3.449.203.813	48.365.465
8	DINAS SOSIAL	3.788.291.582,00	3.888.800.163	100.508.581
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.844.895.656,00	2.881.904.586	37.008.930
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.022.997.253,00	1.936.555.865	(86.441.388)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.061.615.248,00	5.095.787.793	34.172.545
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.779.333.724,00	2.810.719.338	31.385.614
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.316.725.047,00	3.281.994.630	(34.730.417)
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.690.243.636,00	8.690.243.136	(500)
15	DINAS PERHUBUNGAN	2.488.496.158,00	2.443.422.450	(45.073.708)
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3.810.161.814,00	3.881.389.710	71.227.896
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.749.768.821,00	2.724.003.138	(25.765.683)
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.644.441.737,00	5.644.441.737	-

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2024	P-RKPD 2024	TAMBAH / (KURANG)
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	2.743.043.447,00	2.669.208.347	(73.835.100)
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.543.890.401,00	2.594.871.567	50.981.166
21	DINAS PARIWISATA	3.217.512.497,00	3.243.257.694	25.745.197
22	DINAS PERTANIAN	17.723.044.084,00	18.248.634.463	525.590.379
23	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.355.315.699,00	4.368.460.703	13.145.004
24	SEKRETARIAT DAERAH	35.904.107.036,00	35.904.353.340	246.304
25	SEKRETARIAT DPRD	26.035.836.683,00	25.822.344.971	(213.491.712)
26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.303.911.393,00	6.276.513.423	(27.397.970)
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	137.682.742.504,00	145.469.169.488	7.786.426.984
28	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.503.191.738,00	5.411.676.807	(91.514.931)
29	INSPEKTORAT DAERAH	4.878.428.841,00	5.001.361.921	122.933.080
30	KECAMATAN SANGKUB	2.332.185.379,00	2.209.627.938	(122.557.441)
31	KECAMATAN BINTAUNA	3.556.627.202,00	3.600.261.188	43.633.986
32	KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR	1.926.278.749,00	1.998.314.687	72.035.938
33	KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	1.487.434.988,00	1.516.296.039	28.861.051
34	KECAMATAN KADIPANG	1.242.328.558,00	1.116.936.597	(125.391.961)
35	KECAMATAN PINOGALUMAN	2.151.789.134,00	2.151.789.134	-
36	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.091.020.530,00	30.047.306.181	(43.714.349)
TOTAL		650.425.103.890	658.311.499.852	7.886.395.962

5.2. REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAB VI

PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang kondisi umum daerah yang terkait capaian kinerja penyelenggaraan urusan daerah, evaluasi RKPD hingga Triwulan II Tahun 2024, perubahan kerangka keuangan dan ekonomi daerah Tahun 2024, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta perubahan target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024. Selain itu Perubahan RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
- b. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
- c. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
- d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana dapat dievaluasi sebagai upaya pencapaian sasaran strategis dalam RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini untuk dipedomani oleh seluruh aparatur pelaksana.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


SIRAJUDIN LASENA